



**Judul** : MAFIA PERADILAN: Kejagung Bekukan Rekening Zarof Ricar  
**Tanggal** : Jumat, 01 November 2024  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## MAFIA PERADILAN

# Kejagung Bekukan Rekening Zarof Ricar

**JAKARTA, KOMPAS** — Penyidik Kejaksaan Agung memblokir sejumlah rekening yang diduga terkait dengan Zarof Ricar, tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Selain mendalami asal muasal uang sebesar Rp 920 miliar dan emas 51 kilogram, penyidik kini juga tengah menelusuri berbagai aset yang diduga merupakan hasil gratifikasi.

Perihal pemblokiran rekening yang diduga terkait Zarof Ricar itu disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Jakarta, Kamis (31/10/2024). "Jumlah (rekening) yang diblokir saya enggak hafal. Kan, banyak sekali. Banyaklah yang kami cari," kata Abdul.

Abdul menolak merinci terkait kepemilikan rekening Zarof tersebut atas nama dia sendiri atau menggunakan nama orang lain. Namun, Abdul memastikan bahwa pemblokiran rekening juga dibarengi dengan pemeriksaan terhadap keluarga Zarof.

Zarof Ricar merupakan bekas pejabat Mahkamah Agung (MA) yang ditangkap pada Kamis (24/10), sehari setelah Kejagung menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Heru Hanindyo, Erintuah Damanik, dan Mangapul. Ketiga hakim itu diduga menerima suap untuk memvonis bebas Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan pacarnya, Dini Sera Afrianti, sedangkan Zarof diduga disuap untuk mengupayakan hakim agung di MA agar tetap menyatakan Ronald tidak bersalah dalam putusan kasasi.

Penyidik Kejagung menemukan uang yang diduga akan diberikan kepada majelis kasasi Ronald Tannur saat meninggalkan rumah Zarof di bilangan Senayan, Jakarta. Bersamaan dengan itu, penyidik juga menemukan uang tunai senilai Rp 920 miliar dalam berbagai pecahan mata uang asing serta emas seberat 51 kilogram.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan, penyidik kini tengah mendalami asal muasal uang tunai yang ditemukan di rumah Zarof Ricar beberapa hari yang lalu. "Sedang diperdalam status uang tersebut," ujarnya.

Penyidik juga terus memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus dugaan suap tersebut. Hingga saat ini, jumlah saksi yang diperiksa terkait tersangka Zarof sebanyak 15 orang, termasuk istrinya. Mereka dimintai keterangan mengenai hubungannya dengan Zarof. Selain itu, juga keterkaitan para saksi dengan perkara yang menjerat Zarof.

Abdul juga memastikan bahwa penyidik tengah menelusuri kasus-kasus kasasi di MA yang diduga diamankan oleh Zarof. "Sekarang penyidik sedang bekerja. Pada saatnya nanti pasti akan gelar perkara," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menambahkan, penyidik mencermati setiap informasi yang beredar di masyarakat terkait uang tunai dan emas yang ditemukan di rumah Zarof. Ketika ditanya soal kemungkinan Kejagung memeriksa pejabat MA yang diduga terkait dengan Zarof, Harli tidak mengiyakan.

"Nanti kita lihat bagaimana proses penyidikannya. Itu, kan, baru Informasi di masyarakat," katanya.



Untuk saat ini, kata Harli, penyidik masih mendalami hubungan antara Zarof dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tannur selaku pemberi suap. Kasus permufakatan suap dan gratifikasi tersebut menjadi pintu masuk lebih dalam ke perkara asal muasal uang.

"Makanya, kita lihat nanti percakapan-percakapan itu. Apakah ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain? Bagaimana sebenarnya. Kalau pintunya tidak terbuka, pakai model pembuktian bagi yang menerima," ujarnya.

### **Mafia belum hilang**

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR, Nasir Djamil, mengatakan, penangkapan Zarof dan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi untuk membebaskan terdakwa Ronald Tannur menunjukkan mafia peradilan belum hilang dari lembaga peradilan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menduga, barang bukti uang dan emas yang ditemukan di rumah Zarof sengaja dikumpulkan. Uang tersebut dikumpulkan untuk para oknum hakim agung atau hakim lainnya yang bisa diambil kapan saja setelah mereka pensiun. Sebab, jika langsung diberikan, akan memunculkan risiko yang lebih besar.

Kasus itu, katanya, bisa jadi momentum yang tepat di awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membersihkan institusi penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga peradilan, dari perilaku korupsi.

Presiden dapat segera memerintahkan Kejagung agar mengusut kasus itu hingga tuntas. Kejagung harus mengungkap asal usul dan tujuan pemberian uang dan emas tersebut, serta pihak mana saja yang terlibat dalam makelar kasus di pengadilan tersebut.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, menambahkan, kasus ini hendaknya dijadikan momentum bagi Kejagung untuk menyelidiki lebih jauh pihak-pihak yang terlibat dugaan suap, termasuk hakim agung.

(NAD/DYT)